DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

SURAT PERNYATAAN ii

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI ix

DAFTAR LAMPIRAN xvii

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR DAN SKEMA xix

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah 15

1.3 Pembatasan Masalah 15

1.4 Perumusan Masalah 16

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 17

1.5.1 Tujuan Penelitian 17

1.5.2 Kegunaan Penelitian 17

1.5.2.1 Kegunaan Teoritis 17

1.5.2.2 Kegunaan Praktis 18

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional 18

1.6.1 Kerangka Pemikiran 18

1.6.2 Hipotesis 33

1.6.3 Definisi Operasional 33

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 35

1.7.1 Metode Penelitian 35

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 36

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 36

1.9 Sistematika Penulisan 37

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional 39

2.2 Kerjasama Internasional 42

2.3 Pradigma Pluralis (Pluralism) 43

2.4 Organisasi Internasional 45

2.4.1 Tipologi Organisasi Internasional 47

2.4.2 Fungsi dari Organisasi Internasional 48

2.5 Konsep Peranan Organisasi Internasional 51

2.6 Hukum Internasional 54

2.6.1 Definisi Hukum Internasional 54

2.6.2 Sumber-sumber Hukum Internasional 55

2.7 Lingkungan Hidup ……56

2.7.1 Pengertian Lingkungan Hidup ……56

2.7.2 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional 58

2.7.3 Aspek Legal Tentang *Illegal Logging* di Indonesia ……60

2.8 Konsep Illegal Logging ……62

BAB III OBJEK PENELITIAN

3.1 Uni Eropa …….....65

3.1.1 Latar Belakang Uni Eropa …….....66

3.1.2 Proses Pembentukan Pembentukan Uni Eropa (UE) …….67

3.1.3 Struktur Organisasi Uni Eropa ……75

3.2 Latar Belakang Program *Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) ……79

3.2.1 Tujuan *Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) …….80

3.2.2 Lokasi Proyek dan Pemilihan Tempat Kerja ……82

3.2.3 Sumber Dana dan Anggaran ……82

3.3 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup di Indonesia 89

3.3.1 Illegal Logging di Indonesia 89

3.3.2 Aspek Yuridis Mengenai *Illegal Logging* di Indonesia …….91

3.3.3 Gambaran Umum *Illegal Logging* di Kalimantan Barat …….94

3.3.3.1 Hutan Tanaman Industri (HTI) …….96

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Program *Forest Law Enforcement Governance and Trade* di Kalimantan Barat ……...103

4.1.1 Program *Forest Law Enforcement* ……...104

4.1.1.1 Memverifikasi undang-undang yang relevan dengan sektor kehutanan dan mendukung Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan, mendokumentasi dan mempublikasi penelitian tentang pembalakan liar ……...106

4.1.1.2 Mendefinisikan proses, peran dan tanggung jawab lembaga yang relevan untuk penuntutan kasus-kasus ……...108

4.1.1.3 Mendukung kegiatan-kegiatan ad-hoc yang diidentifikasi oleh Panitia Pengarah Nasional dan Provinsi ……...112

4.1.2 Program *Governance* ……...115

4.1.2.1 Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang tata pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip multi-pihak terkait di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan desa ……...116

4.1.2.2 Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat

desa mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik …..119

4.1.2.3 Pendirian pusat Informasi di tingkat nasional, dan di kawasan-kawasan program, di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota …….123

4.1.2.4 Mengembangkan pangkalan data untuk memasukkan informasi *Geographic Information Systems* (GIS), perizinan dan izin kayu dan catatan-catatan mengenai jenis kayu serta volumenya masing-masing maupun total konversinya …….124

4.1.3 Program *Silviculture* ……..129

4.1.3.1 Pengembangan sistem pengelolaan hutan dan silvikultural yang lebih baik untuk digunakan dalam konsesi penebangan kayu yang sudah ditinggalkan …...129

4.1.3.2 Mendukung penerimaan dan penggunaan sistem-sistem pengelolaan dan silvikultural yang cocok disertai jaminan hukum untuk konsesi penebangan kayu yang sudah ditinggalkan ……...131

4.1.4 Program *Trade* …….133

4.1.4.1 Mendukung restrukturisasi industri kayu di tingkat nasional dan propinsi ……...134

4.1.4.2 Pembentukan pangkalan data industri kayu provinsi …..136

4.1.4.3 Mendukung Dephut untuk menetapkan suatu system guna menentukan persediaan dan permintaan di masa depan ……...137

4.1.4.4 Mendukung fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan verifikasi kayu ……...140

4.1.4.5 Memastikan koordinasi atau dukungan internasional menyangkut masalah-masalah perdagangan dengan negara-negara Asia dan Pasifik, Uni Eropa serta negara-negara importir lainnya ……144

4.1.5 Program *Liaison* ……...146

4.1.5.1 Koordinasi kegiatan-kegiatan Program dengan Pemerintah Indonesia, para donor, sektor swasta, masyarakat sipil dan LSM …….147

4.1.5.2 Membantu atau ikut serta dalam negosiasi yang akan menghasilkan Kesepakatan Kemitraan Sukarela antara UE-lndonesia ……...152

4.1.5.3 Meningkatkan dialog dan kerja sama dengan lembaga nasional dan regional serta badan-badan lain yang pada saat ini terlibat dalam pelaksanaan inisiatif FLEG(T) ……154

4.1.5.4 Menyediakan saran dan studi independen untuk Dephut dan PSC mengenai *FLEGT* dan masalah-masalah yang berkaitan …….155

4.2 Kendala-kendala yang dihadapi *Programme Forest Law Enforcement Governance and Trade Menanggulangi Illegal Logging* di Kalimantan Barat ……...……155

4.2.1 Kendala Program *Forest Law Enforcement* ……...156

4.2.2 Kendala Program *Governance* …….156

4.2.3 Kendala Program *Silviculture* ……..156

4.2.4 Kendala Program *Trade* ……..157

4.2.5 Kendala Program *Liaison* ……157

4.3 Hasil Implementasi *Programme Forest Law Enforcement Governance and Trade* dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di Kalimantan Barat ……...157

4.3.1 Program Law Enforcement (Undang-Undang Kehutanan yang Lebih Baik dan Penegakannya) ……..158

4.3.2 Program Governance (Tata Kelola Sektor Kehutanan yang Lebih Baik melalui Pertanggungjawaban dan Transparansi yang Lebih Baik) ……160

4.3.3 Program Sistem Silvikultural (Penilaian sistem silvikultural saat ini serta sistem yang cocok diterapkan oleh para

pemangku kepentingan) ……...161

4.3.4 Program Trade (Berkurangnya perdagangan liar hasil hutan, dan ditingkatkannya perdagangan yang sah) …….162

4.3.5 Program Liaison (Koordinasi Kegiatan *FLEGT* dan Hubungan di Antara Para Donor, organisasi internasional lainnya (mis. ASEAN) dan Pemerintah Indonesia sudah siap) ……...163

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 169

5.2 Saran 171

DAFTAR PUSTAKA 174

LAMPIRAN